

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SISWA MISKIN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Suryanti Baddura
suryantibaddura@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bantuan siswa miskin di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan siswa miskin di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe Penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian adalah siswa SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebanyak 81 orang dan teknik penarikan sampel mengambil secara keseluruhan populasi yang ada, yakni sebanyak 81 orang. Dasar pengambilan sampel jenuh ini apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini yakni kepala sekolah, guru, dan siswa dan orang tua siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang telah berjalan sangat baik, dapat dilihat dari beberapa indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (Sikap birokrasi dan pelaksana) dan struktur organisasi. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap program bantuan siswa miskin yaitu perencanaan sangat mempengaruhi 81,75%, pengorganisasian sangat mempengaruhi 80%, koordinasi sangat mempengaruhi 95% dan evaluasi sudah terlaksana sangat mempengaruhi 93%.

Kata Kunci : Implementasi dan bantuan siswa Miskin

Abstract

This study aims to determine how the implementation of poor student assistance policies at State High School 1 Watang Pulu, Sidenreng Rappang Regency and the factors that influence the implementation of poor student assistance policies at State High School 1 Watang Pulu, Sidenreng Rappang Regency. The type of research that the author uses is descriptive and the research method used in this study is the method of observation, interviews, questionnaires and documentation which is carried out systematically based on the research objectives. The population in this study were students of SMA Negeri 1 Watang Pulu, Sidenreng Rappang Regency who received 81 students from the Poor Student Assistance (BSM) and the sampling technique took the entire existing population, which was 81 people. The basis for sampling is saturated if the subject is less than 100, then it is better to take all, so that the research is a population study. While the informants in this study were principals, teachers, and students and parents of students at the State High School 1 Watang Pulu, Sidenreng Rappang Regency. The results of this study indicate that the implementation of the Poor Student Assistance Policy at the State High School 1 Watang Pulu, Sidenreng Rappang Regency has been going very well, it can be seen from several indicators, namely communication, resources, disposition (bureaucratic attitude and implementers) and organizational structure. While the factors that influence the poor student assistance program are planning greatly affects 81.75%, organizing greatly affects 80%, coordination greatly affects 95% and evaluation has been carried out greatly affects 93%.

Keywords: Poor student implementation and assistance

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan di bidang pendidikan meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Maka dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mutu pendidikan, serta menekan putus sekolah pemerintah memperluas akses pendidikan dasar melalui beberapa program yang diantaranya adalah BOS, PKH, dan BSM.

Bantuan Siswa Miskin termasuk dalam Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 menjelaskan tentang anggaran kompensasi BBM meliputi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan, penyesuaian besaran bantuan Program Keluarga Harapan, bantuan dan tambahan subsidi bidang transportasi, penyesuaian besaran dan perluasan cakupan bantuan siswa miskin, dan penyesuaian jumlah raskin (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Langkah-Langkah Pengendalian Belanja Pemerintah Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012).

BSM adalah salah satu dari program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Program BSM berupa bantuan sejumlah uang tunai sebesar 425ribu pertahun yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program BSM bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi

siswa miskin dalam memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan. Program BSM juga dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa yaitu Pembelian perlengkapan siswa (misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas), biaya transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa untuk sekolah sehingga dapat meringkankan beban orang tua siswa (Kemdikbud, 2013).

Sasaran atau Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah siswa yang orang tuanya penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin Khusus untuk SD dan SMP, orang tua siswa terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yatim, piatu, atau yatim piatu, siswa berasal dari korban musibah, kelainan fisik, korban PHK dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Kemendikbud, 2013).

Implementasi program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia ternyata belum bisa dikatakan berhasil, karena permasalahan baru terjadi pada saat setelah disalurkan nya Bantuan Siswa Miskin (BSM) ke seluruh Indonesia yaitu terkait rendahnya serapan dana BSM kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah harus bekerja keras untuk mensosialisasikan program BSM, karena permasalahan yang terjadi dapat menghambat pencapaian keberhasilan program BSM.

Pelaksanaan program BSM dilaksanakan di seluruh provinsi Sulawesi Selatan, dan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang melaksanakan Program BSM yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang. Akan tetapi program BSM di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program BSM yaitu SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki masyarakat miskin yang jumlahnya paling banyak diantara dusun yang lainnya yaitu 128 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk dalam keluarga miskin. Implementasi program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang mulai dijalankan sejak tahun 2009. Jumlah siswa yang mendapat Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten

Sidenreng Rappang selalu mengalami perubahan di setiap tahun. Hal tersebut dikarenakan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat semakin bertambah.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan banyak permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Siswa Miskin juga di alami di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang SDN permasalahannya yaitu terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh orang tua siswa dalam program Bantuan Siswa Miskin. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa dana yang diberikan belum tepat sasaran, adanya kendala dalam sumberdaya dana. Pencairan dana yang disalurkan oleh pemerintah terkadang tidak tepat waktu juga dapat menghambat pelaksanaan program BSM, dan rendahnya komunikasi antara para implementor dapat menghambat pelaksanaan program BSM.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai tentang "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang".

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan pemerintah setelah perumusan dan penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Riant (2006; 42) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja (performance). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik. Implementasi itu dianggap sederhana meski anggapan ini dianggap menyesatkan. Dengan kata lain, kelihatannya tidak mengandung isu-isu besar. George C. Edward III, dalam AG. Subarsono (2005: 90-91) bahwa berhasil atau terhambatnya suatu proses implementasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
2. Sumber daya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.
3. Disposisi atau sikap. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
4. Struktur birokrasi. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Siswa Miskin yaitu :

1. Perencanaan. Perencanaan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila suatu rencana telah dapat disusun dengan baik maka sebagian dari pada masalah telah dipecahkan, dimana perencanaan sangat membantu dalam menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah alat untuk mencapai tujuan berupa struktur organisasi.
3. Koordinasi. Pelaksanakan berbagai kegiatan program penerimaan bantuan siswa miskin dalam suatu organisasi tanpa disertai koordinasi yang baik maka akan mengalami hambatan.
4. Evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, Positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu evaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian adalah siswa SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebanyak 81 orang dan teknik penarikan sampel mengambil secara keseluruhan populasi yang ada, yakni sebanyak 81 orang. Dasar pengambilan sampel jenuh ini apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini yakni kepala sekolah, guru, dan siswa dan orang tua siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, begitupun Dengan implementasi Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan tujuan awal penelitian ini, yaitu hendak melihat bagaimana proses komunikasi, Sumber daya, di disposisi

dan struktur birokrasi terhadap implementasi Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga untuk mengetahui dampak implementasi Bantuan Siswa Miskin pada guru di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi Bantuan Siswa Miskin khususnya pada siswa SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Implementasi yang efektif terjadi apabila pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan guru sudah mengetahui apa yang akan beliau kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan beliau kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga implementasi program bantuan siswa miskin harus dikomunikasikan kepada pihak yang tepat yaitu siswa yang telah benar-benar bisa atau memenuhi syarat untuk menerima bantuan siswa miskin. Selain itu, program yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer penerima bantuan siswa miskin tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam bantuan siswa miskin.
2. Sumber Daya. Suatu kebijakan mungkin saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan. Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang, dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya implementasi Bantuan Siswa Miskin di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana). Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementer, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementer memiliki disposisi

yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementer memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Adapun pengertian Disposisi yang penulis maksud adalah sikap dari pelaksana dalam melaksanakan Bantuan Siswa Miskin. Sikap pelaksana tersebut dilihat dari komitmennya di dalam implementasi kebijakan, kejujuran pihak pelaksana, serta sifat demokratis dari pelaksana untuk menerima hasil-hasil yang telah dicapai.

4. Struktur Birokrasi. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Watang Pulu. Hasil penelitian dapat dikemukakan dampak dari implementasi bantuan siswa miskin, dan dinilai berdasarkan Variabel kinerja yaitu

1. Perencanaan. Perencanaan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila suatu rencana telah dapat disusun dengan baik maka sebagian daripada masalah telah dipecahkan, dimana perencanaan sangat membantu dalam menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah alat untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud penulis pada dampak implementasi Bantuan Siswa Miskin adalah

struktur organisasi SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Koordinasi. Dampak dari implementasi Bantuan Siswa Miskin yang lain adalah koordinasi. Ini sangat dirasakan oleh para siswa yang telah menerima bantuan siswa miskin. Dengan adanya bantuan siswa miskin kita selaku orang tua merasa terbantu dengan adanya program tersebut, kami selalu koordinasi dengan kepala sekolah dan para guru mengenai prosedur penerimaan bantuan BSM.
4. Evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, Positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu evaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

Dampak Implementasi bantuan siswa miskin di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang mendapat tanggapan baik dari orang tua siswa, siswa, dan guru-guru juga ditemukan adanya kemajuan siswa dalam hal prestasi dengan adanya program bantuan siswa miskin.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut :

1. Implementasi bantuan siswa miskin sudah optimal. Hal ini terutama terlihat dari:
 - a. Komunikasi yaitu telah terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan disampaikan kepada sekolah-sekolah dalam hal ini SMA Negeri 1 Watang Kabupaten Pulu Sidenreng Rappang melalui Kepala sekolah yang kemudian disampaikan kepada guru-guru.
 - b. Sumber daya yang sudah memadai yaitu mutu guru yang sudah maksimal dalam , akan tetapi masih ada kekurangan pada fasilitas belajar.
 - c. Disposisi. Faktor disposisi yang meliputi komitmen guru sikap demokratis dan kejujuran serta tanggung jawab guru dalam pelaksanaan penerimaan bantuan siswa miskin telah baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap guru yang melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dalam menanggapi setiap aspirasi orang tua siswa dalam memajukan pendidikan siswa SMA

Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

d. Struktur Birokrasi. Jelasnya struktur organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga implementasi Bantuan Siswa Miskin nampak terorganisir dengan baik.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi bantuan siswa miskin terhadap kinerja adalah : perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan evaluasi. Dari keempat indikator itu telah ditemukan dampak dari implementasi bantuan siswa miskin di SMA Negeri 1 Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. REFERENSI

- Abdul, W. S. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah, S. (2007). *Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep Pendekatan, dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Makassar: Persadi.
- Gie, T. L. (2006). *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Grindel, M. S. (1980). *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Priceton University Press.
- Hasibuan, S. (2003). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Pelayanan Publik (Public Policy)*. Diterjemahkan oleh Ricky Ismanto. Penerbit. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kayatomo, S. (2005). *Program Pembangunan*. Bandung: Sinar Baru.
- M, M. (2007). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara, A. A. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nogroho, R. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang, Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rakhmat. (2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Arief.
- Riant, N. D. (2009). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Kompetido.
- Siagian, S. P. (2002). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarko. (2005). *Public Policy (Kebijakan Pemerintah) Cetakan Keempat*. Surabaya: Penerbit Airlangga Univesity Press.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taybnapis, F. Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, B. (2005). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Wahab, A. S. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Cetakan Keenam*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- William, D. (1998). *Analisis Kebijakan Publik Edisi II, Cetakan I*. Yogyakarta: UGM Press.